



SATU DATA
INDONESIA



DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

15 Agustus 2022

Disampaikan oleh : Dewi Aminah, S.Si

Dasar Hukum Data dan Informasi Pembangunan

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004

Pasal 31

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Pasal 274

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 274

Pemerintah Daerah WAJIB menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi

3. Permendagri No 86 Tahun 2017

Pasal 144

Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

4. Permendagri No 70 Tahun 2019

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah WAJIB menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - b. Informasi Keuangan Daerah;
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.

Dasar Hukum Satu Data

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019

Pasal 2

Pengaturan **Satu Data Indonesia** dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

2. Peraturan Bupati No 41 Tahun 2021

Pasal 3

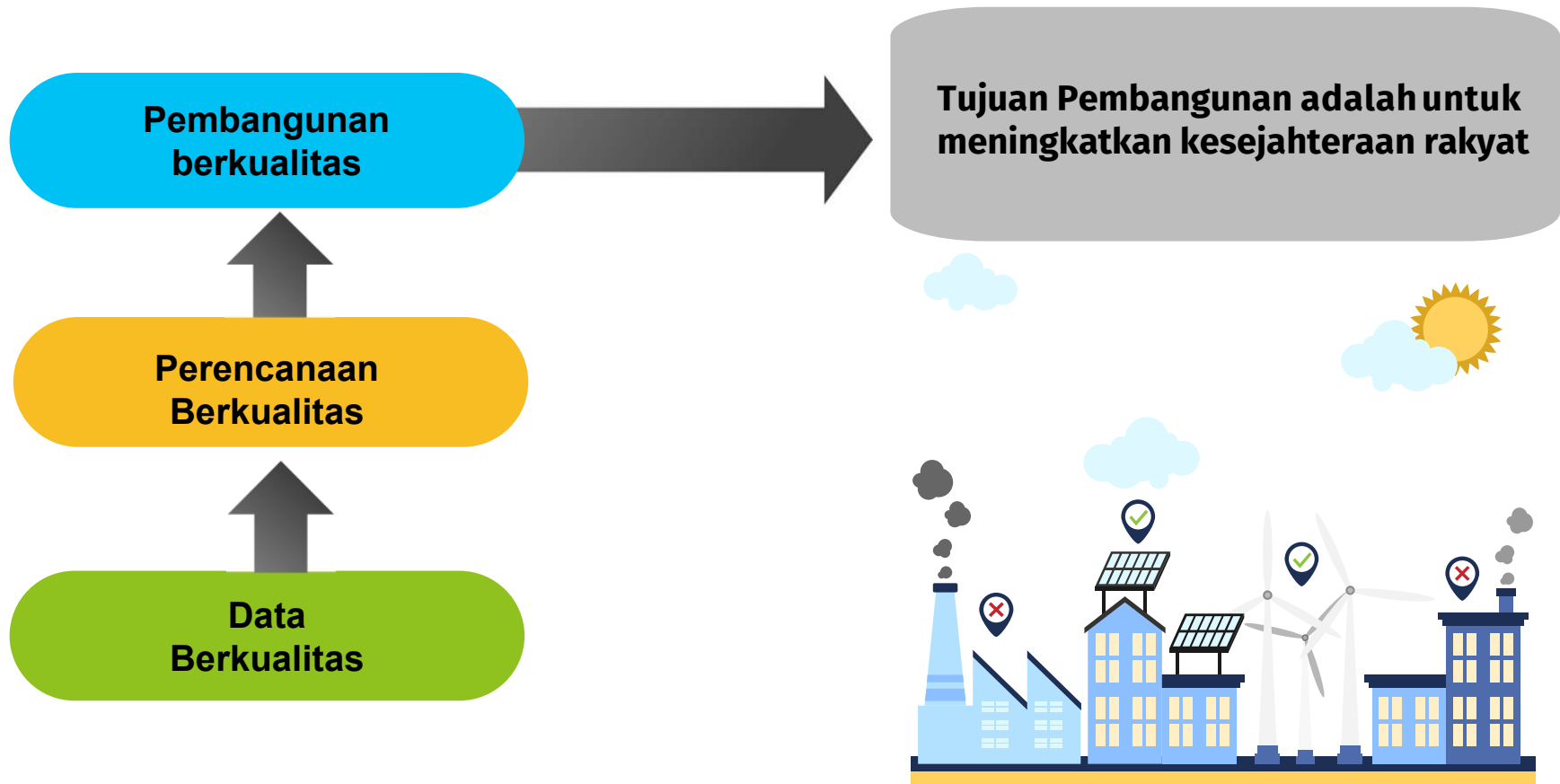
Tujuan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus adalah untuk mewujudkan satu basis data pembangunan yang terpusat dan integrasi, menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Daerah dan pemangku kepentingan, dan mendukung SDI

3. SK Bupati Kudus Nomor : 050/136/2022

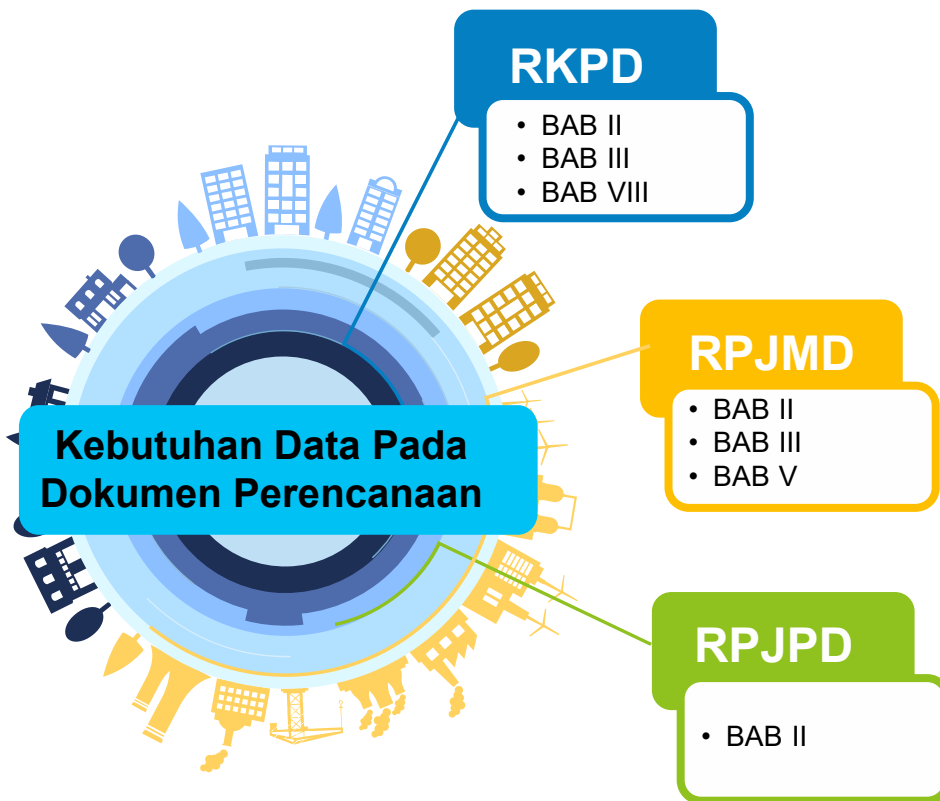
Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kudus

Waadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/ atau Organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus

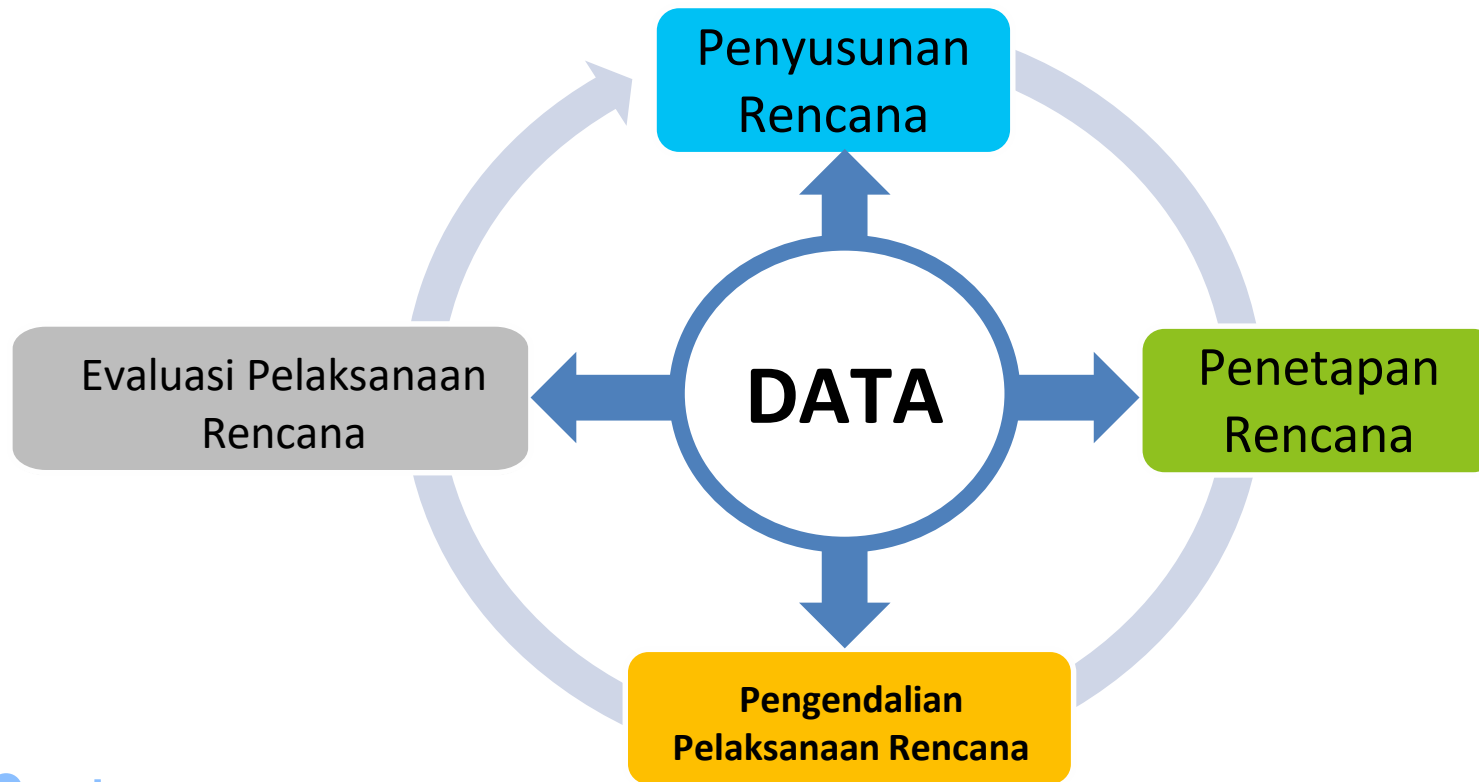
Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014



FUNGSI DATA UNTUK DOKUMEN PERENCANAAN



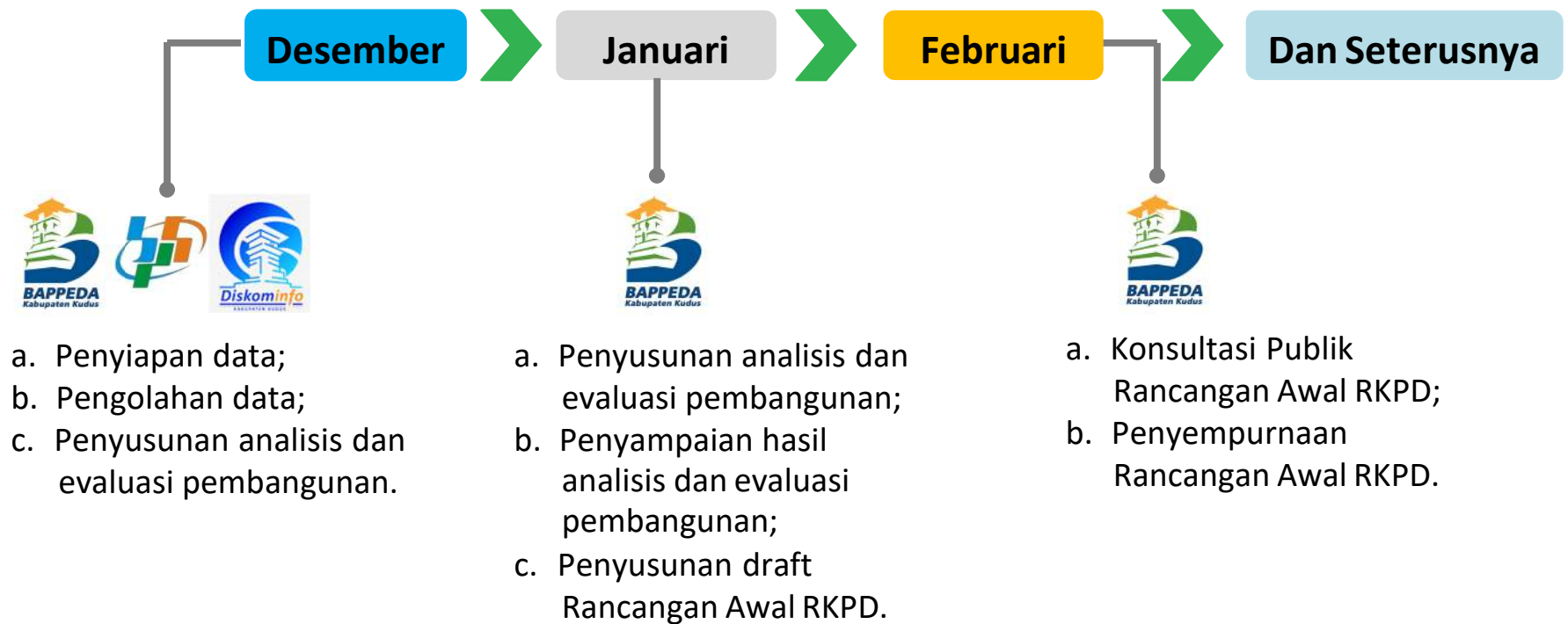
PERAN DATA DALAM SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Pembangunan berawal dari data dan menghasilkan data

Sumber : UU No 25 Tahun 2004

KEBUTUHAN DATA DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

Tata Kelola Pemerintah Daerah yang BERKUALITAS

Sistem MENGHASILKAN DATA & INFORMASI Berkualitas

Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem MEMBUTUHKAN DATA & INFORMASI Berkualitas

Permendagri 86/2017 dan Permendagri 70/2019 tentang SIPD

Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia

UU 16/1997
Statistik

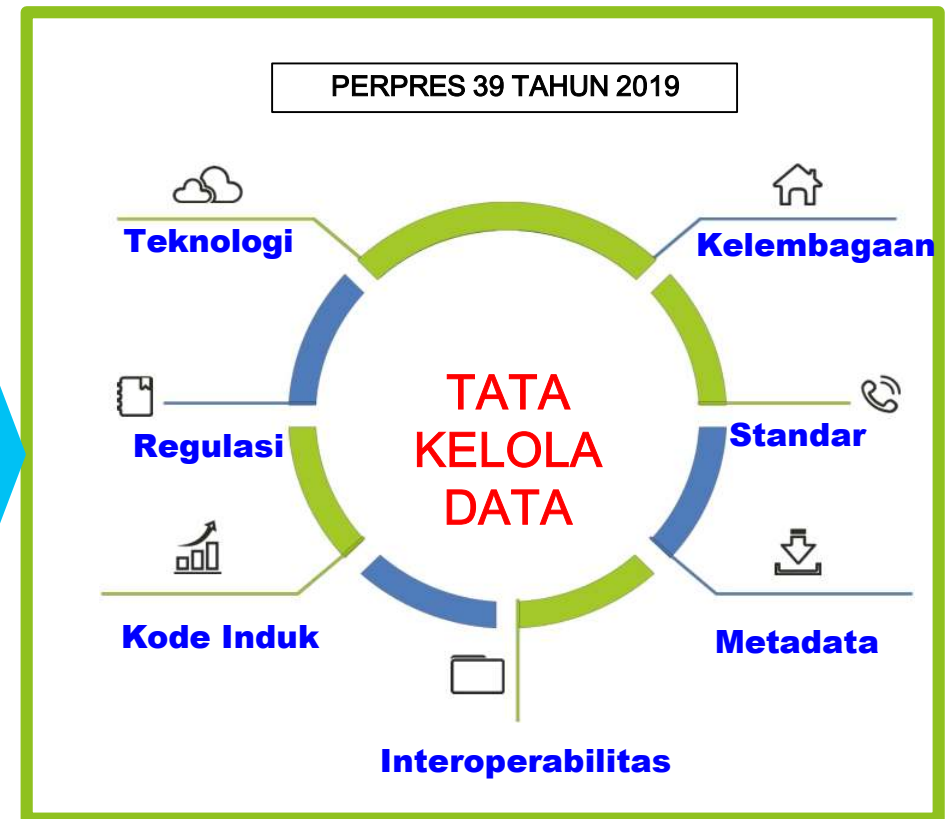
UU 25/2004
Perencanaan Pembangunan Nasional

UU 4/2011
Informasi Geospasial

UU 23/2014
Pemerintahan Daerah

PERMASALAHAN PENYEDIAAN DATA BERKUALITAS

1. Data yang belum berkualitas (belum memenuhi standar dan tidak memiliki metadata)
2. Sistem database sektoral yang belum terpadu
3. Belum seragamnya kode referensi atau data induk
4. Data yang sulit diakses dan Tidak Terintegrasi
5. Ketidakjelasan unit pengelola data
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola Data



DIPERLUKAN TATA KELOLA DATA YANG BAIK

Peran Bappeda Pada Satu Data Kabupaten Kudus



SATU DATA
INDONESIA

- Sebagai koordinator Forum
- Sebagai Sekretariat Forum
- Sebagai konsumen data
- Sebagai produsen data

KELEMBAGAAN PENYELENGGARA



Pengarah
(Bupati)



Forum Satu Data Jateng
(Ka. Bappeda)



Sekretariat
(Bappeda)

Pelaksana

Terdiri dari :

1



Koordinator
(Bappeda)

2



Pembina Data

1. BPS (Statistik)
2. Dinas PUPR (Geospasial)

3



Walidata Daerah
(Dinas Kominfo)

4



Walidata Pendukung
(Sekretaris setiap PD)

5



Produsen Data
(Kepala setiap PD)

SK Bupati Kudus Nomor : 050/136/2022

Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kudus

SUSUNAN FORUM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	Bupati	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah	Pembina	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	Koordinator forum merangkap sebagai pembina data dan produsen data
4	Kepala Badan Pusat Statistik	Wakil Ketua I	merangkap pembina data statistik
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua II	merangkap pembina data geospasial
6	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	merangkap sebagai walidata pendukung
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Walidata merangkap sebagai produsen data
8	Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Anggota	merangkap sebagai produsen data
9	Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kudus	Anggota	merangkap sebagai produsen data
10	Sekretaris / Pejabat Administrator yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah	Anggota	merangkap sebagai walidata pendukung

SK Bupati Kudus Nomor : 050/136/2022

Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kudus

SUSUNAN SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Kepala	
2	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
3	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5	Subkoordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
6	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	4 (empat) orang yang ditunjuk

KEBUTUHAN DATA PERENCANAAN, DIAMANATKAN OLEH

PMDN 86 Th 2017

TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



PMDN 18 Tahun 2020

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



PMDN 21 Tahun 2021

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



SUMBER LAINNYA YANG MENDUKUNG (BPS, KEMENTERIAN/LEMBAGA, HASIL SURVEY, HASIL PENELITIAN, DLL).



PMDN 86 Tahun 2017

TATA CARA PENGOLAHAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jenis informasi gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat diperoleh melalui:

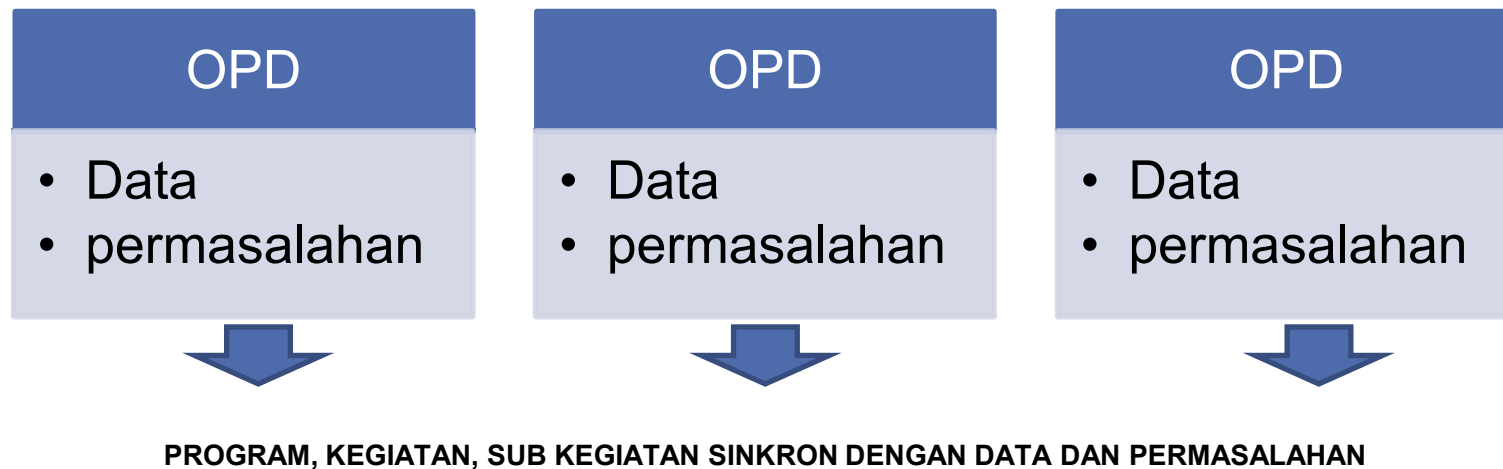
- **DATA PRIMER** yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah.
- **DATA SEKUNDER** yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya.

Muatan Data dan Informasi (PMDN 86 Th 2017)

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	ASPEK PELAYANAN UMUM	ASPEK DAYA SAING DAERAH
Luas dan batas wilayah administrasi	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Letak dan kondisi geografis	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Topografi	Urusan Pilihan	Fokus Iklim Berinvestasi
Geologi	Fungsi Pendukung	Fokus Sumber Daya Manusia
Hidrologi dan Klimatologi	Fungsi Penunjang	

Identifikasi Permasalahan Pembangunan

- HARUS ditunjukkan dengan DATA yang MENYATAKAN adanya PENINGKATAN / PENURUNAN, sehingga ditemukan intervensi yang perlu diupayakan.

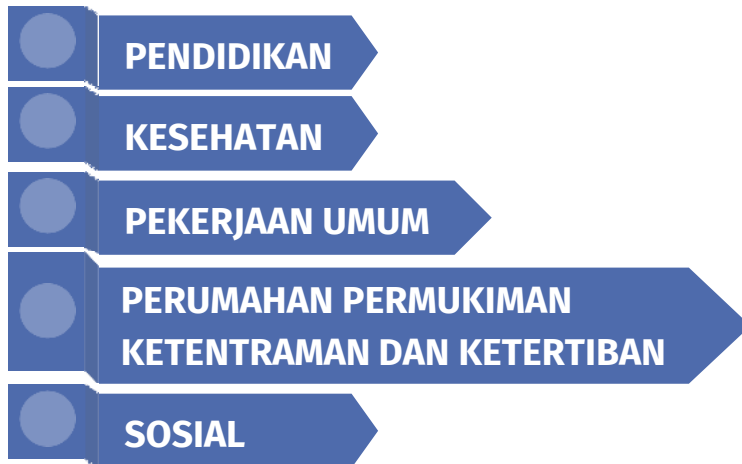


**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**



MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR



**Memuat
INDIKATOR 2**



**WAJIB DIAKOMODIR
DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN**



SANKSI MENUNGGU

SPM dalam DOKUMEN RKPD TAHUN 2023

Tabel 2.25
Target dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Realisasi Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (84.533)	1 Tahun	104,06 % (87.966)
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/ atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 % (2.200)	1 Tahun	66,7 % (1.467)
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 % (4442)	1 Tahun	67,8 % (300)

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dokumen LPPD Kabupaten Kudus, 2022

Dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2021 yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar pendidikan yaitu Pendidikan Dasar terdiri dari 3.904 personil; Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari 715 personil; dan Pendidikan Kesetaraan terdiri dari 322 personil.

PMDN NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah **menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD.**

IKK dalam DOKUMEN RKPD TAHUN 2023

Tabel 2.39
Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Outcome Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2021

NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
				Elemen data	Capaian Kinerja
32	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	%	894	89,94
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		994	
33	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	%	2595	100,00
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		2595	
34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Orang	136.828	136.828
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Orang	137.828	137.828
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Orang	36.048	36.048
		Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas			

SULIT MENENTUKAN INDIKATOR ???

CARI DISINI

Perka BPS No 126 Tahun 2020 tentang Master File Standar Data Statistik Tahun 2020.

Basis data yang berisi kumpulan standar data statistic lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan statistik.

Memuat antara lain :

KONSEP → ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi

DEFINISI → penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.



MASTER FILE STANDAR DATA STATISTIK TAHUN 2020

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	SD00001.00.01	Indikator SDGs	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	<i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.	Klasifikasi Stadium klinis Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)/HIV menurut WHO	1. Infeksi Primer HIV 2. Stadium I 3. Stadium II 4. Stadium III 5. Stadium IV	Jumlah	Orang
2	SD00001.00.01	Indikator SDGs	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	<i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.	Klasifikasi Stadium klinis Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)/HIV menurut WHO	1. Infeksi Primer HIV 2. Stadium I 3. Stadium II 4. Stadium III 5. Stadium IV	Jumlah	Orang
3	SD00001.00.02	Indikator SDGs	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	<i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.	Klasifikasi Stadium klinis Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)/HIV menurut CDC	1. Kategori A 2. Kategori B 3. Kategori C	Jumlah	Orang
4	SD00001.00.02	Indikator SDGs	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi	<i>Acquired Immuno</i>	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang	Klasifikasi Stadium klinis	1. Kategori A 2. Kategori B	Jumlah	Orang

**PMDN 86 Th
2017**

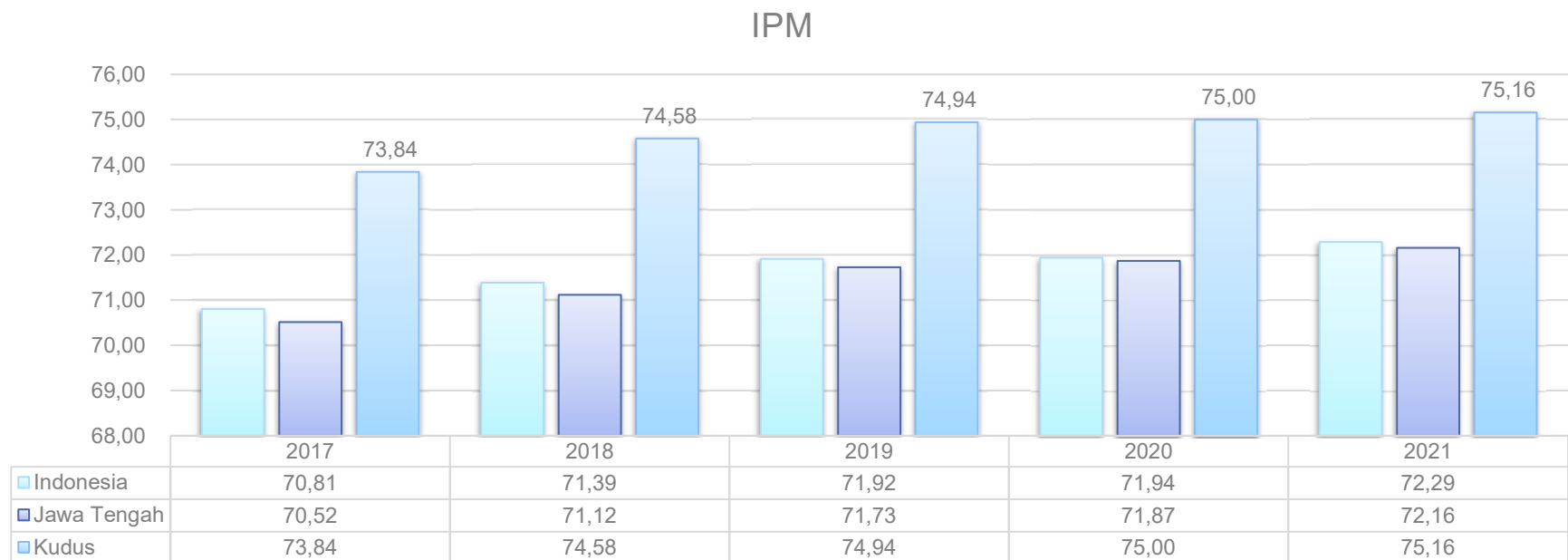
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
18.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$
19.	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$
20.	Rasio penduduk yang bekerja	$\frac{\text{Rasio penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$
21.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	$\frac{\text{Produk Domestik Bruto}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$
22.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	$\frac{\text{Kesempatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$
23.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	$\frac{\text{Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga}}{\text{Total kesempatan kerja}} \times 100\%$
24.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	$\frac{\text{Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I}}{\text{jumlah keluarga}} \times 100\%$

**Perka 126 Th
2020**

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
123	SD00052.00.00	Indikator SDGs	3.7.1.(a)	15-49 tahun yang berstatus kawin.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
124	SD00053.00.00	Indikator SDGs	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Angka-angka per kapita	Ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi.	Klasifikasi Angka-angka per kapita	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
125	SD00054.00.00	Indikator SDGs	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Klasifikasi Angkatan Kerja	Menurut lokasi: 1. Perkotaan 2. Perdesaan Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan: 1. Tidak Pernah Sekolah 2. Tidak tamat SD	Jumlah; persentase	Orang; persen

TERIMA KASIH

IPM KUDUS DIBANDING NASIONAL DAN JAWA TENGAH



Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah.....	
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	
2.1.1.1. Geografi	
2.1.1.2. Demografi	
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi ...	
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB	
2.2.1.2. Laju Inflasi	
2.2.1.3. PDRB Perkapita.....	
2.2.1.4. Indeks Gini.....	
2.2.1.5. Kemiskinan	
2.2.1.6. Kriminalitas	
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia	
2.2.2.2. Harapan Lama Sekolah	
2.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah	
2.2.2.4. Usia Harapan Hidup Saat Lahir.....	
2.2.2.5. Pengeluaran Per Kapita	
2.2.2.6. Kesempatan Kerja	
2.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga	
2.2.4. Sakip dan Reformasi Birokrasi.....	

2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-33
2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-33
2.3.1.1. Pendidikan	II-33
2.3.1.2. Kesehatan	II-40
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-45
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-49
2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-51
2.3.1.6. Bidang Sosial	II-58
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-61
2.3.2.1. Bidang Tenaga Kerja.....	II-61
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-68
2.3.2.3. Pangan	II-73
2.3.2.4. Pertanahan.....	II-77